

**RELEVANSI DAN AKTUALISASI KONSEP BUDAYA *SIRI'* TERHADAP  
TERCIPTANYA POLITIK LOKAL YANG DEMOKRATIS PADA PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2015  
DI KABUPATEN GOWA**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan politik  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**ARDIANSYAH  
30600112046**

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## MOTO

*“kadang kala kita tak mengerti bahwa kesempatan adalah sebuah keberuntungan. beruntung karena memiliki sebuah kesempatan. Ada banyak jejak dengan ribuan peristiwa namun minim kesyukuran. Bagi saya pernah menyandang status mahasiswa bak kesempatan dalam wujud keberuntungan yang harus disyukuri. Dunia kampus ibarat potongan-potongan kenyataan yang memberi peluang untuk belajar tentang hidup. Katakanlah tentang seputar teori kausalitas Hegel (hubungan sebab akibat) yang kemudian merangsang saya untuk berfikir sadar bahwa hasil adalah manifestasi dari proses, orang yang berdiri sukses hari ini adalah orang-orang yang barangkali pernah menangis darah beberapa tahun yang lalu tak pernah ada hasil yang menakjubkan tanpa ada proses yang hebat”*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah  
Nim : 30600112046  
Tempat/Tgl. Lahir : Japing, 29 Agustus 1993  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat, dan Politik.  
Alamat : Japing, Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa  
Judul Skripsi : **RELEVANSI DAN AKTUALISASI KONSEP BUDAYA *SIRI* TERHADAP TERCIPTANYA POLITIK LOKAL YANG DEMOKRATIS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI KABUPATEN GOWA**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya/peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari karya/peneliti orang lain., jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karna hukum.

Samata-Gowa, 8 Desember 2016

Penyusun,



**ARDIANSYAH**  
Nim : 30600112046

## PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi yang berjudul, "Relevansi dan Aktualisasi konsep Budaya *Siri*, Terhadap Terciptanya Politik Lokal Yang Demokratis Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa" disusun oleh Ardiansyah, Nim: 30600112046, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Desember 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 22 Desember 2016

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang: Dr. Abdullah M. Ag.

Sekretaris: Syahrir Karim, S.Ag, M.Si., Ph.D.

Munaqisy I: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

Munaqisy II: Drs. Burhanuddin Yusuf, M.Ag.

Pembimbing I: Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin MA. Ph.D

Pembimbing II: Wahyuni S.Sos M.Si

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.  
NIP. 1959074 1 98903 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas berkat dialah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi untuk lebih menambah pengetahuan dan pengalaman di sebuah Universitas. Terimakasih atas nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, takhenti-hentinya Allah SWT melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

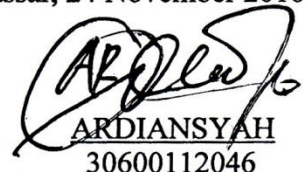
Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin-Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

3. Kepada Dr. Syarifuddin Jurdi.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik, serta Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D.selaku sekretaris jurusan.
4. Kepada pembimbing skripsi Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA, selaku Konsultan I dan Wahyuni, S.Sos, M.Si selaku Konsultan II, yang selama bimbingan banyak memberi saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penulis hingga taraf penyelesaian.
6. Kepada kedua Orang Tua yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya.
7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik terkhusus mahasiswa IPO. 3 dan 4 angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Makassar, 24 November 2016

  
ARDIANSYAH  
30600112046



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Tinjauan Teoris.....	17
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	35
1. Letak Dan Geografis.....	35
2. Iklim dan Cuaca.....	39
3. Jumlah Penduduk.....	39
4. Tingkat Pendidikan.....	41
5. Visi, Misi Dan Tujuan.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Relevansi Budaya <i>siri</i> ' dengan Demokrasi.....	46
1. Budaya <i>Siri</i> ' Kompatibel Dengan Demokrasi.....	50

2. Budaya <i>siri</i> ' Tidak Kompatibel dengan Demokrasi.....	55
B. Aktualisasi <i>Siri</i> ' di Pilkada Gowa Tahun 2015.....	57
1. Aktualisasi <i>siri</i> ' di Pilkada Gowa Tahun 2015.....	58
a. Tidak Akuratnya Penetapan data Pemilukada.....	60
b. KPUD yang Tidak Netral.....	63
c. Money Politik.....	64
d. Mencuri star kampanye.....	65
e. Dukungan PNS yang Tidak Netral.....	66
f. Pelanggaran Kampanye Dalam Pengerahan Massa.....	67
2. Bupati Sebagai Produk Pilkada.....	67
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DaftarPustaka .....	77



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Relevansi dan Aktualisasi konsep Budaya *Siri'*, Terhadap Terciptanya Politik Lokal Yang Demokratis (Studi Kasus Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana relevansi budaya lokal *siri'* terhadap terwujudnya politik lokal (Pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa dan Bagaimana aktualisasi budaya *siri'* di Pilkada serentak Kabupaten Gowa Tahun 2015. Teori yang digunakan dalam menguraikan masalah tersebut adalah teori strukturasi, demokrasi, perubahan sosial, dan struktural fungsional.

Hasil penelitian menemukan adanya dua pendapat mengenai relevansi Budaya *siri'* terhadap terwujudnya politik lokal (pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa. Pendapat pertama mengatakan bahwa nilai-nilai *siri'* kompatibel dengan konsep demokrasi yaitu merujuk pada korelevansi antara konsep *siri'* dan demokrasi pada asas kebaikan secara kolektif (humanisasi), asas kejujuran, dan keadilan. Pandangan kedua mengatakan bahwa budaya *siri'* tidak kompatibel dengan konsep demokrasi yakni melihat bahwa nilai-nilai mempertahankan yang cenderung berambisi dalam konsep *siri'* bisa menjadi ancaman terhadap tuntutan sikap sportifitas dalam konsep demokrasi.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tidak diaktualisasikannya konsep *siri'* dengan melihat dua hal yaitu saat proses berlangsungnya pilkada dan sosok pemimpin yang dihasilkan sebagai produk pilkada. Terjadinya banyak pelanggaran saat pemilu pilkada berlangsung sebagai indikator bahwa nilai-nilai *siri'* tidak diaktualisasikan yakni sebagai berikut: Tidak akuratnya data pemilih, KPUD Kabupaten Gowa yang tidak netral, *money politics*, mencuri star kampanye, dukungan PNS yang tidak netral, dan pelanggaran dalam pengarahannya massa kampanye. Selanjutnya pilkada menghasilkan pemimpin yang menjadikan budaya lokal sebagai alat politik sehingga mengindikasikan bahwa nilai-nilai *siri'* tidak teraktualisasikan

**Kata Kunci:** Relevansi, Aktualisasi, Budaya *Siri'* dan Pilkada

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar belakang***

Istilah kebudayaan atau *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata kerja dalam bahasa latin *colore* yang berarti bercocok tanam (*cultivation*) dan bahkan dikalangan penulis pemeluk agama Kristen istilah *cultura* juga dapat diartikan sebagai ibadah atau sembahyang (*worship*). Menurut bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* (budi atau akal) kemudian ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk “budi-daya” yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Koentjaraningrat mendefenisikan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. E.B Tylor dalam telaah Purwanto, mendefenisikan kata kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan politik ditunjukkan antara lain oleh riset yang dilakukan oleh Robert Putnam dan Ronald Inglehart. Menurut Putnam, budaya adalah akar dari perbedaan-perbedaan yang besar antara Italia Utara

---

<sup>1</sup> Hari Poerwanto. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 ), hal. 51-52.

yang bercorak demokratis dan Italia Selatan yang bercorak otoritarian. Menurut Inglehart dalam telaah Siti Zuhro, memandang bahwa masyarakat sangat bervariasi dalam tingkat penekanannya pada nilai-nilai peninggalan dan nilai-nilai ekspresi diri. Masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai ekspresi diri kecenderungannya akan lebih demokratis daripada masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai peninggalan. Kesimpulan kedua ilmuwan tersebut mewarisi pemikiran rintisan dari Alexis De Tocquevelli yang menyimpulkan bahwa apa yang membuat sistem politik Amerika Serikat berhasil adalah kecocokan budayanya dengan demokrasi.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 32/2004 mengenai otonomi daerah, memungkinkan konsep pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan adat hal ini dikuatkan lagi dengan dihasilkannya amandement kedua UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) Bab VI bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kemudian dipertegas lagi Pasal 28 I Bab X A yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai hak asasi manusia. Otonomi daerah menjadikan masyarakat lokal mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya. Tingginya tingkat fragmentasi lokal menuntut demokrasi lokal untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi secara universal, dalam arti pemerintah dan masyarakat lokal

---

<sup>2</sup> Siti Zuhro, Dkk. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* (Yogyakarta: Ombak, 2009 ), hal. 275.

bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Demokrasi lokal merupakan salah satu media untuk mewujudkan peran aktif masyarakat lokal.<sup>3</sup>

Indonesia adalah suatu negara yang di dalamnya didiami oleh berbagai macam suku, ras, agama dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap suku memiliki kebudayaan masing-masing, kebudayaan inilah yang kemudian dijunjung tinggi karena dipandang sebagai tatanan nilai dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Lebih khusus Makassar adalah salah satu suku yang memiliki kebudayaan sendiri yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakatnya.

Makassar diakui bukan sebatas nama perkampungan yang kemudian menjadi kota. Makassar adalah nama salah satu suku yang membawa karakteristik spesifik manusia yang hidup dan berinteraksi serta kebanggaan-kebanggaan yang kemudian dilahirkan. Sebagai nama suku ada kekhasan yang terbangun dari akumulasi karakter manusia yang berlandaskan nilai budaya yang dipengaruhi oleh pelbagai tatanan yang hidup dan berkembang disekelilingnya, termasuk agama dan kepercayaan yang dianut. Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi wadah bagi berseminya nilai-nilai kebanggaan tersebut.<sup>4</sup>

Orang Bugis-Makassar dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang keramat dan sakral yang keseluruhannya mereka sebut *panngaderreng* atau *pangngadakkang* dalam bahasa

---

<sup>3</sup> Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 113-114.

<sup>4</sup> HB. Amiruddin Maulana. *Demi Makassar* (Makassar: Global Publishing, 2001), hal. 152-153

Makassar. Sistem adat keramat dari orang Bugis-Makassar itu berdasarkan atas lima unsur pokok ialah: (1) *Ade'* (*ada'* dalam Makassar), (2) *Bicara*, (3) *Rapang*, (4) *Wari'* dan (5) *Sara'*. Unsur-unsur pokok tersebut dari adat keramat tadi terjalin satu sama lain sebagai suatu kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis-Makassar, yang memberi rasa sentimen kewargaan masyarakat, identitas sosial dan juga martabat dan rasa harga diri, yang terkandung semuanya dalam konsep *SIRI'*.<sup>5</sup>

Alvin Toffler melihat bahwa di tengah arus globalisasi ternyata muncul paradoks menguatnya semangat menonjolkan karakter lokalitas. Fenomena ini punya nilai positif terutama bila dikaitkan dengan era otonomi daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri seluas mungkin. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah menonjolkan kekhasannya sebagai sumber potensi. Disisi lain era otonomi daerah yang seluas-luasnya juga berdampak negatif bagi lokalitas dengan perkembangan semangat etnosentrisme dan potensi disintegrasi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kebijakan yang menonjolkan kepentingan sempit lokalitas tampak mulai dari isu putra daerah, kebijakan transmigrasi yang hanya membuka peluang bagi perpindahan penduduk dalam satu provinsi, sampai pada upaya mengembalikan simbol-simbol kejayaan kerajaan.<sup>6</sup> Hal negatif inipun tampaknya terlihat di kabupaten Gowa pada Pilkada serentak 2015

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Yogyakarta: Djambatan, 1979), hal. 270.

<sup>6</sup> Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* (Bandung: Graha Ilmu, 2007), hal. 71-72.

lalu, budaya lokal seolah-olah tak punya andil untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis.

Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan realitas dari pola pikir, tingkah laku, maupun nilai-nilai yang diatur oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat pendukungnya, dijadikan dasar dalam berperilaku. Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tampaknya sudah terbentuk sebagai suatu norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hujurât ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena”*

---

<sup>7</sup> Wahyuni, *Perilaku Beragama, Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 114-116.



Penjelasan ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan adalah kualitas ketakwaan kepada Allah SWT. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, maka sudah seharusnya untuk mengenal budaya atau tradisi masyarakat yang berbeda di suatu daerah. Semakin kuat pengenalan masyarakat terhadap budaya masyarakat yang lain, maka akan memberi peluang untuk saling memberi manfaat.

Berbicara mengenai pandangan agama Islam terhadap tradisi terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun dari generasi yang satu kegenerasi berikutnya. Tradisi tersebut ada kemungkinan tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lain, sehingga hanya berlaku bagi sekelompok masyarakat.

Keberadaan tradisi dalam masyarakat dinyatakan sebagai suatu aturan yang meliputi segala perkataan, tindakan, dan sebagainya yang lazim dituruti serta dilakukan sejak zaman nenek moyang atau leluhur. Sehingga sampai sekarang masih dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah didapatkan, tanpa harus mempertimbangkan kegiatan tersebut dapat bertentangan dengan ajaran agama atau tidak.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانُوا

ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahan:

*"dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*

Agama Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Islam tidak datang untuk menghancurkan tradisi atau budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam mengingatkan agar umat manusia jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Endar Wismulyani, *Jejak Islam di Nusantara*, Cet 1 (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hal.46-47

Islam juga sangat toleran terhadap tradisi. Dalam hadis diterangkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»<sup>9</sup>

Terjemahan:

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda: "Berilah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, mudahkan urusan mereka jangan kamu persulit." (HR. Muslim).*

Hadis di atas memberikan pesan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kabar gembira, dan tidak menjadikan orang lain membencinya, memudahkan dan tidak mempersulit, antara lain dengan menerima sistem dari luar Islam yang mengajak pada kebaikan. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama. Menolak tradisi mereka, berarti mempersulit keIslaman mereka.

---

<sup>9</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Ḥasan al-Qusayrīy al-Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī t.th), hal. 1358.

Oleh karena itu dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

10 «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْطَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا»

Terjemahan:

*“Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mereka tidaklah meminta kepadaku satu langkah perbuatan yang membuat mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkan aku pasti akan memenuhinya". (HR. Bukhari).*

Hadis di atas memberikan penegasan, bahwa Islam akan selalu menerima ajakan kaum musrik pada suatu tradisi yang membawa pada pengagungan hak-hak Allah dan ikatan silaturrahi. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak anti tradisi. bahkan mengapresiasi tradisi yang dapat membawa pada kebaikan<sup>11</sup>.

Perkembangan masyarakat dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan kondisi obyektif bagi tumbuhnya budaya lokal, serta partisipasi rakyat secara melembaga dan kritis sebagai kontrol politik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>12</sup> Budaya Bugis Makassar mengenal istilah *Pappasang* yaitu amanat atau pesan-pesan yang dituangkan oleh orang tua (leluhur) kepada generasi penerus. *Pappasang* ini terdapat lima Prinsip yang terkandung

---

<sup>10</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, (Cet. I; Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H), hal. 193.

<sup>11</sup> <http://www.muslimedialnews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-as-sunnah.html#ixzz4D081zILV>

<sup>12</sup> Isran Noor, *Politik Otonomi Daerah*, (Jakarta: Profajar Jurnalism, 2013), hal. 12.

didalamnya dan orang yang dipandang memiliki harga diri atau *siri* harus berpegang kepada lima prinsip tersebut. Kelima prinsip tersebut adalah amanah, jujur, sopan, berpendirian kuat dan taat pada tuhan yang maha esa. Bila disimpulkan secara luas manusia yang mengamalkan kelima prinsip-prinsip tersebut adalah manusia yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sejatinya memang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri yang Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai *siri* sesuai dengan pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis<sup>13</sup>. Bagian ini penulis akan melihat bagaimana relevansi budaya lokal terhadap terciptanya pemerintahan lokal yang demokratis di era pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Relevansi dan Aktualisasi konsep Budaya *Siri*’, Terhadap Terciptanya Politik Lokal Yang Demokratis ( Studi Kasus Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa ).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana relevansi budaya lokal *siri*’ terhadap terwujudnya politik lokal (Pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa ?

---

<sup>13</sup> Andi Moein MG. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar Sirik Na Pacce* (Ujung Pandang: Mapress 1988), hal. 17-18.

2. Bagaimana aktualisasi budaya *siri'* di Pilkada serentak Kabupaten Gowa Tahun 2015 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Diterapkannya pemerintahan yang bersifat desentralisasi menempatkan budaya dan kearifan lokal seharusnya berperan penting dalam terciptanya perpolitikan lokal yang demokratis. Hal ini yang membuat peneliti berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji aktualisasi konsep budaya lokal *siri'* pada penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Gowa pada tahun 2015 dengan berpatokan pada sebuah tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui relevansi budaya lokal *siri'* terhadap terwujudnya politik lokal (Pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui aktualisasi budaya *siri'* di Pilkada serentak Kabupaten Gowa Tahun 2015.

#### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan dan menambah cakrawala dalam melihat budaya lokal sebagai faktor penting terhadap terciptanya politik lokal yang demokratis.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi tambahan informasi, referensi dan sebagai acuan bagi yang membutuhkan dan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

**D. Tinjauan pustaka**

Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

1. Yuwanto Arif Sofianto dalam jurnalnya yang berjudul “Kontribusi Budaya Politik Lokal Dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”

. Adapun hasil penelitian yang ditulis oleh Yuwanto Arif Sofianto yaitu bahwa kontribusi budaya politik lokal terhadap demokratisasi dapat dibedakan menjadi kontribusi terhadap pemahaman atau nilai demokrasi dan kontribusi terhadap perilaku warga masyarakat. Kontribusi tersebut berasal dari nilai lama maupun baru pasca reformasi yang dapat memberikan kontribusi konstruktif maupun destruktif. Kontribusi konstruktif nilai-nilai budaya politik lokal ialah memberikan landasan bagi komitmen bersama, toleransi, kerjasama dan partisipasi yang tinggi. Sedangkan kontribusi destruktif adalah nilai-nilai patrimonialisme yang masih ada, pragmatisme, kebebasan tanpa batas dan proseduralisme. Kontribusi konstruktif perilaku ialah kerjasama, menghargai



keberadaan orang lain dan partisipasi yang baik dalam sistem politik lokal. Sedangkan kontribusi destruktif adalah pragmatisme yang kuat, orientasi ekonomis (finansial) dalam partisipasi dan menguatnya individualisme masyarakat yang kurang mendukung kesetaraan dan kebersamaan.<sup>14</sup> Penulis menjadikan hasil penelitian di atas sebagai tinjauan pustaka karena dianggap memiliki kesamaan, yakni melihat hubungan budaya lokal dengan pemerintahan lokal yang demokratis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah selain lokasi penelitian, penulis juga meneliti budaya lokal dengan secara lebih spesifik, dalam hal ini penulis lebih menggali relevansi budaya *siri*, *sipakatau* dan *sipakalabbiri* terhadap terciptanya pemerintahan lokal yang demokratis.

2. Rifqi Zabadi Asshegaf dalam skripsinya yang berjudul “Demokrasi Otonomi Daerah Dan Perilaku Politik Jawara ( Studi Tentang Peran Jawara Dalam Pemenangan H. Mulyadi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008)”

Adapun hasil penelitian yang ditulis oleh Rifqi Zabadi Asshegaf yaitu. Pelaksanaan otonomi daerah di sisi lain ternyata telah memberikan kesempatan kepada elit tradisional seperti jawara dalam melebarkan pengaruhnya dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik jawara dalam

---

<sup>14</sup> Yuwanto Arif Sofianto, *kontribusi budaya politik lokal dalam demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)*, (Semarang: sebuah Jurnal ).

Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008 dilakukan dengan cara mensukseskan calon bupati dan wakil bupati pasangan H. Mulyadi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah sebagai tim sukses.<sup>15</sup> Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai politik lokal. Perbedaannya penelitian ini melihat hubungan antara elit lokal dengan keberhasilan seorang kandidat di pilkada lokal, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji hubungan antara budaya lokal dengan politik lokal yang demokratis.

3. Fahri Rezki Rahman dalam skripsinya, Aktualisasi Nilai Budaya Lokal Dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kota Palopo, terkait dengan variabel nilai budaya lokal *adele*, *lempu*, dan *getteng*, terhadap pemahaman dan aktualisasi nilai tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin pemerintahan. Oleh karena berdasarkan hasil temuan penulis, tidak semua informan paham dan aktualisasikan nilai budaya lokal tersebut dari

---

<sup>15</sup> Rifqi Zabadi Asshegaf. *Demokrasi Otonomi Daerah Dan Perilaku Politik Jawara ( studi tentang Peran Jawara dalam kemenangan H. Mulyadi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008)* ( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: sebuah skripsi, 2013).

representasi struktur yang ada<sup>16</sup>. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji budaya lokal secara lebih spesifik, yang membedakan adalah penelitian ini melihat aktualisasi budaya lokal dalam kepemimpinan pemerintah di Kota Palopo, artinya penelitian ini cenderung mengkaji aktualisasi oleh pemimpin terhadap budaya lokal dalam pemerintahannya. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya seputar kepemimpinan.

4. Edwin Yustian Driyartana dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi”

Hasil penelitian ini mengatakan keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara, jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya.<sup>17</sup> Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang politik lokal, namun perbedaannya adalah penelitian ini lebih menjadikan partai politik lokal sebagai fokus penelitian.

5. Andi Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul “Reproduksi Status Tradisional Dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo”

hasil penelitian ini memperlihatkan pola dan karakteristik dari praktek *Ajjoareng-joa* cukup berpengaruh guna mendapatkan dukungan politik dan

---

<sup>16</sup>Fahri Rezki Rahman, *Aktualisasi Nilai Budaya Lokal Dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palopo* ( Universitas Hasanuddin Makassar : Sebuah Skripsi, 2013).

<sup>17</sup>Edwin Yustian Driyartana, *Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi* ( Universitas Sebelas Maret Surakarta: Sebuah Skripsi, 2010).

kedudukan kekuasaan. Reproduksi status cukup mempengaruhi kultur masyarakat wajo dalam menduduki kekuasaan dan dan dihadirkan pada praktek-praktik politik sebagai bagian dari upaya strategi politik mendominasi kekuasaan.<sup>18</sup> penelitian ini memiliki kesamaan yang dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu keterlibatan budaya lokal dan relevansinya terhadap politik lokal, perbedaannya adalah budaya lokal pada penelitian ini dijadikan sebagai strategi politik.

Penelitian ini memiliki keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu karena penulis mengkaji lebih spesifik tentang konsep serta pengaktualisasian nilai-nilai budaya lokal *Siri'* di Kabupaten Gowa. Budaya lokal sebagai tatanan nilai telah menjadi identitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai pedoman dalam bertindak pada kehidupan sosial secara umum. Penulis pada penelitian ini akan memaparkan tentang makna *siri'* secara substansi dengan berdasarkan pada informasi-informasi yang diperoleh dari budayawan lokal serta pihak pemerintah terkait, yang sangat paham dan mengetahui konsep siri secara historis maupun kondisinya saat ini. Selanjutnya penulis akan mendiskripsikan sinergitas antara budaya lokal dengan politik lokal dengan menjadikan pesta demokrasi yakni Pilkada sebagai indikator

---

<sup>18</sup> Andi Muhammad Yusuf. *Reproduksi Status Tradisional Dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo* ( Universitas Hasanuddin Makassar: Sebuah Skripsi, 2012).

penerapan konsep budaya lokal. Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Gowa sebagai labolaturum penerepan manifestasi dari kehidupan sehari-hari pada umumnya..

## **E. Tinjauan teoritis**

### **1. Teori Strukturasi**

Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktek-praktek sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Aktifitas-aktifitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain. Artinya aktifitas-aktifitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.<sup>19</sup>

Giddens mengkaji seluruh permasalahan ini karena ia frustasi dengan kecenderungan banyak ilmu sosial untuk menempatkan diri mereka pada satu sisi atau sisi lainnya dari dualisme struktur-agensi dasar ini. Giddens berusaha melampaui dualisme tersebut melalui apa yang disebutnya teori strukturasi. Argument dasarnya adalah bahwa struktur dan agensi bukanlah entitas yang terpisah keduanya adalah saling tergantung dan berkaitan secara internal. Struktur

---

<sup>19</sup> Anthoni Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 5.

hanya ada melalui agensi, dan agen mempunyai aturan dan sumber daya di antara mereka yang akan memfasilitasi atau menghambat aksi mereka.

Giddens seperti kaum strukturalis, mengakui bahwa struktur-struktur tersebut memang membatasi apa yang bisa dilakukan individu. Namun, berbeda dengan strukturalis, Giddens menyatakan bahwa aturan dan sumber daya ini juga memungkinkan aksi tertentu. Satu poin kunci dari model Giddens adalah bahwa tindakan tertentu bisa mengarah pada rekonstruksi struktur, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Secara keseluruhan teori Strukturasi memberikan model yang seimbang, yakni struktur dan agensi berinteraksi dengan erat. Metafora Giddens untuk hal ini adalah bahwa alih-alih sebagai fenomena yang berbeda, struktur dan agensi dalam kenyataannya adalah dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>20</sup>

Teori strukturasi Giddens menyerang atau mengkritisi sistem melalui fungsi-fungsi struktur dan aktor di dalamnya. Giddens memastikan kemampuan individu untuk berperan dalam masyarakat atau komunitas budayanya, yang masih kuat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat yang membentuk paham strukturalisme sosial dan budaya dalam praktik sosial dan budaya dalam kehidupannya sehari-hari. Paradigma atau asumsi-asumsi dasar teori strukturasi, melihat posisi dan peran manusia di dalam

---

<sup>20</sup> David Marah dan Gerry stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 334-335.

struktur dilihat dari kemampuan manusia sebagai aktor hingga kemampuan agensinya di dalam dan/atau terhadap struktur tersebut.

Giddens berangkat dari teori subjek atau *theory of the subject* yang memandang posisi dan peran manusia di dalam struktur, bersyarat dan bertolak dari kemampuan agensinya. Tindakan sosial adalah hasil bentukan struktur, demikian juga struktur sendiri merupakan bentukan agen. Penjelasan tersebut mengindikasikan adanya dualitas struktur, yaitu struktur merupakan medium dan agensi sekaligus pada saat yang sama merupakan *out come* agensi. Teori strukturasi menekankan beberapa hal pada hubungan manusia dengan struktur atau agensi dan struktur, dan pertimbangan ruang dan waktu dalam perubahan sosial atau konsep *time, space and sosial change*.

Pertama, hubungan pelaku (*agency*) dan struktur merupakan dualitas dan bukan dualisme, yaitu adanya hubungan dualitas-timbal balik agen dan struktur, didalamnya terdapat hubungan tindakan aktor dan struktur yang saling mengandaikan dan mempengaruhi. Kedua, sentralitas pengaruh ruang dan waktu, di mana ruang (*space*) dan waktu (*time*) bukan arena tindakan melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat, hingga perubahan sosial yang terjadi. Sehingga *space, time and social change* dinyatakan berbengaruh secara menyeluruh terhadap segala perubahan dan keberlanjutan, kemampuan aktor hingga reproduksi struktur dan sosialisasi agensi dengan pertimbangan ideologi dan kesadaran.



Konsep teori Giddens dalam konteks ruang dan waktu mempengaruhi tindakan aktor dan/atau agen dalam mencapai tujuannya, akan menemui prakondisi dan kondisi bilamana manusia bertindak. Kondisi bertalian dengan syarat dan situasi dalam pertimbangan nilai kultural, yang menyebabkan selalu adanya pergeseran, transisi, dan pertimbangan tawar-menawar posisi ruang dan waktu dalam kearifan budaya tradisional dan budaya modern. Sehingga searah dengan perkembangan teorinya.

Giddens menyatakan bahwa aktifitas manusia bersifat rekursif, yaitu aktifitas yang dilakukannya tidak selalu terbawa dalam arus *setting* lingkungan sosialnya, tetapi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan dibentuk kembali dalam atau oleh aktifitas manusia melalui pengertian yang kemudian diekspresikan sendiri oleh agen. Dijelaskannya, cara berpartisipasi atau cara bertindak dalam konteks kehidupan sosial, mencakup cara mematuhi aturan (*rule*) dalam struktur sosial. Sehingga peraturan merupakan haluan dalam media (*struktural*) sekaligus tolak ukur dan stimulator dilakukannya berbagai tindakan dan praktek sosial. Sehingga menguatkan asumsi atas hubungan dan saling ketergantungan antara struktur dan aktor (individu), struktur dengan tindakan dan agensi, di mana struktur memungkinkan adanya tindakan, sebagai media dan pada saat yang sama struktur merupakan *outcome* reproduksi tindakan. Berlanjut pada praktek dan

aktifitas sosial di mana aturan (*rule*) sebagai alat dan bahkan struktur sendiri menjadi sarana dilakukannya aktifitas sosial.<sup>21</sup>

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa latin “*demos*” (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Demokrasi selalu diasosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>22</sup> Menurut Larry Diamond, dalam suatu demokrasi harus ada jalan yang banyak bagi rakyat untuk mengekspresikan kepentingan dan keinginan mereka tidak hanya untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi juga untuk secara terus menerus memantau dan mengontrol pelaksanaan kekuatan negara. Untuk melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan dan mengontrol kekuasaan negara, lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, parlement, sistem pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan harus dibentuk. Memelihara demokrasi terkait dengan pembuatan lembaga dan mekanisme demokrasi yang mampu memenuhi tuntutan rakyat. Suatu rezim demokratis akan mempertahankan legitimasinya hanya bila mampu memenuhi kepentingan materi dan ideal dari rakyat. Legitimasi karenanya merupakan unsur penting dalam menjamin kelangsungan rezim demokratis.

Suatu demokrasi yang terkonsolidasi, menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan, tercapai ketika tiga kriteria tambahan tercapai. Secara tindakan, tidak ada

---

<sup>21</sup> [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-164-468991295-tesiscontent.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-164-468991295-tesiscontent.pdf)

<sup>22</sup> Kabul Budiyo, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 153.

lembaga atau aktor penting yang menggunakan sumber daya yang signifikan berupaya untuk mencapai sasaran dengan menciptakan rezim non-demokratis atau menggunakan kekerasan. Secara sikap, mayoritas besar penduduk percaya bahwa prosedur dan lembaga demokratis merupakan “satu-satunya permainan” untuk mengatur secara kolektif kehidupan dalam masyarakat. Secara konstitusional, kekuatan pemerintah maupun non-pemerintah bertekad untuk menyelesaikan konflik lewat hukum, prosedur dan lembaga tertentu yang diakui proses demokratis.

Sautu demokrasi terkonsolidasi bukan sebagai akhir dari perjalanan politik suatu masyarakat, tetapi sebagai proses interaksi diantara lima arena yang terus berjalan yakni sebagai berikut:

1. Kelompok yang mengorganisasi diri atau masyarakat sipil yang hidup.
2. Suatu masyarakat politik yang secara khusus mengatur diri untuk mengimbangi hak pemimpin yang memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaan atas kekuatan publik dan aparat negara.
3. Aturan hukum yang menjamin tingkat tertentu otonomi dan kemerdekaan masyarakat sipil dan politik
4. Suatu birokrasi negara yang melindungi hak-hak penduduknya dan memberi pelayanan mendasar untuk semua penduduk
5. Kelompok ekonomi yang menjadi penengah antara negara dan pasar.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck. *Demokrasi di Indonesia Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2-4.

### **3. Perubahan Sosial**

Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi. Sebagai contoh dikemukakannya perubahan pada logat bahasa Aria setelah terpisah dari bahasa induknya, akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan ketimbang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas. Sudah barang tentu ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial.

Seorang sosiolog akan lebih memperhatikan perubahan kebudayaan yang bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial serta yang mempengaruhinya. Pendapat tersebut dapat dikembalikan pada pengertian sosiolog tersebut tentang masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat menurut Kingsley Davis, adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antara organisasi-organisasi, dan bukan hubungan antara sel-sel. Kebudayaan dikatakan mencakup segenap cara berfikir dan bertindak laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah fikir secara simbolis dan bukan oleh karena warisan yang berdasarkan keturunan. Apabila diambil definisi kebudayaan dari Tylor- yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan-perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut.<sup>24</sup>

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukkan kedalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Jelaslah, definisi demikian itu serba mencakup. Definisi yang lain juga mencakup bidang-bidang yang sangat luas, perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku<sup>25</sup>

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

#### 1. Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 308-309.

<sup>25</sup> Robert H. Lauer. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 4.

usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut, tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.

## 2. Perubahan kecil dan perubahan besar

Perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa perubahan langsung atau berarti bagi masyarakat misalnya perubahan mode pakaian. Sebaliknya suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris misalnya, merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Pelbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruhi misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya.

## 3. Perubahan yang dikehendaki (*Intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*Planned Change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*Unintended-Change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*Unplanned-Change*)

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan, pada umumnya dapat dikatakan bahwa mungkin sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada

yang letaknya dari luar. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain adalah:

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutam lembaga-lembaga kemasyarakatan.

b. Penemuan- penemuan baru

Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, adalah Inovasi atau *Innovation*. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke beberapa bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tersebut diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Pertentangan (*conflict*) masyarakat.

Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok.

d. Terjadinya pemberontakan atau Revolusi

Revolusi yang meletus pada oktober 1917 di Rusia telah menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar negara Rusia yang

mula-mula mempunyai bentuk kerjaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin Marxis.<sup>26</sup>

#### **4. Teori Struktural Fungsional**

Menurut pendekatan fungsional yang dianut Talcot Parsons dan para pengikutnya, perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya terjadi dalam bentuk luarnya saja. Sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan sosial tersebut pada dasarnya timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan yaitu: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar ( *Extra Systemic change* ). Pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, dan penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan sistem sosial adalah konsensus antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Faster mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya perubahan. Umumnya perubahan sosial ekonomi berawal dari perubahan yang berlangsung dikalangan atas seperti para elite politik, ekonomi dan kalangan intelektual, kemudian menyebar ke lapisan bawah di lingkungan masyarakat yang

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 318-329.



lebih tradisional untuk seterusnya mengimbas ke kalangan masyarakat pedesaan. Menurut Foster, inovasi budaya dikalangan elite memiliki prestise yang terkait dengan para elite tersebut. Hal ini menjadi pendorong bagi penyebaran ide dan pola tingkah laku mereka kepada kalangan bawah secara luas, karena itu Foster melihat kota tempat para elite berada merupakan titik pusat dari perubahan yang berlangsung.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dan latar alami dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni ilmu politik. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari berbagai sarana dilakukan oleh penulis. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dalam penelitian diskriptif adalah membuat deskripsi atau menggambarkan fakta-fakta. Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten tersebut karena di Kabupaten Gowa akar budaya lokal

---

<sup>27</sup> Abdul Azis Albone, Dkk. *Dinamika kehidupan Beragama Muslim pedesaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 25-26.

*siri'* lahir dan berkembang. Hal ini untuk mengetahui relevansi dan aktualisasi budaya lokal tersebut dalam mewujudkan politik lokal yang demokratis.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data primer**

Data primer nantinya digunakan oleh penulis yang didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

Data primer ini antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/*conversation*)

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil dari buku teks, internet, jurnal, dan surat kabar. sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan. Data sekunder didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan umum UIN Alauddin Makassar, KPU Kabupaten Gowa, Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, dari salah satu kandidat calon Bupati Gowa di Pilkada tahun 2015 dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Observasi**

Metode Observasi adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode Observasi sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek lalu melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

#### **b. Metode Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah dirancang dalam instrumen penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu:

- 1) Budayawan lokal Kabupaten Gowa 1 orang
- 2) KPUD Kabupaten Gowa 3 orang
- 3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa 1 orang
- 4) Tim sukses salah satu kandidat calon bupati pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 sekaligus pengurus partai Demokrat Kabupaten Gowa 1 orang
- 5) Keluarga kerajaan Gowa 1 orang
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 1 orang

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua macam yang pada dasarnya berbeda sifatnya yaitu: Pertama, wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. Kedua, wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang diwawancarai. Wawancara sifat pertama yang penting adalah memilih orang yang mempunyai keahlian tentang pokok wawancara.<sup>28</sup> Menggunakan kedua teknik wawancara tersebut peneliti berharap dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya, serta memperoleh informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokument berupa data-data penting seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian (*journal*) kenang-kenangan (*memories*), laporan-laporan monument artefak, foto, tape dan lain-lain.<sup>29</sup> melalui metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran pengamalan budaya lokal ketika Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015. Alat yang digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk mengambil gambar (foto)

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hal, 163.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, hal, 163.

proses wawancara dengan maksud memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara tentang aktualisasi konsep budaya *siri* serta relevansinya terhadap terciptanya politik lokal yang demokratis ( Studi Kasus Pilkada Serentak Kabupaten Gowa Tahun 2015 ).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis digunakan penulis untuk proses penyusunan dalam mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.<sup>30</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian bersifat Analisis dekriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir ditarik.

---

<sup>30</sup> S. Nasution, *Metode Riset* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998), hal. 32

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dan serempak. Mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan dan penyajian serta kesimpulan dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.<sup>31</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam *life history* sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.

c. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari Bagaimana pemahaman dan pengamalan budaya *siri*, *siapakatau* dan *sipakalbbiri* di Kabupaten Gowa, serta apa relevansinya terhadap pemerintahan lokal di Kabupaten Gowa terkhusus pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan

---

<sup>31</sup> Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 10-17.

keterkaitan antara keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

##### **1. Letak dan Geografis**

Kabupaten Gowa adalah kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan yang merupakan daerah otonomi sendiri. Di sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.<sup>32</sup>

Menurut data dari BPS Kabupaten Gowa Tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/ Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 Km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72, 26 persen dan sisanya 27,74 persen berada di dataran rendah. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu' dan Biringbulu'. Dari luas total Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat yaitu pada wilayah

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015.



Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten ini memiliki enam gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng.<sup>33</sup>

### Peta Kabupaten Gowa



Agar lebih jelas tentang gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015.

**Table 1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Jarak dari Ibukota Kab. (Km)</b>	<b>Luas Kecamatan (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>% Thd Luas Kab.</b>
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallasssang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
<b>JUMLAH</b>				1.883,33	100

Sumber: BPS Kabupaten Gowa. Gowa Dalam Angka Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa luas keseluruhan Kabupaten Gowa 1.883,33 KM2 dan Kecamatan terluas berada pada Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 KM2 sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bajeng Barat dengan luas 19,04 KM2. Dengan menggunakan tabel diatas akan mempermudah penulis sekaligus pembaca untuk memahami luas dan letak tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya dan perilaku politik masyarakatnya.

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 kilometer persegi dengan panjang 90 kilometer. dan daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan Kabupaten Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya yang subur. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu Kecamatan Tombolo Pao yang berada di dataran tinggi, dengan luas 251,82 Km2 (13,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa). Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Kecamatan Bajeng Barat, yang luasnya hanya 19,04 Km2 (1,01 persen). Berdasarkan bentuk topografi yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang. Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan

Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili di atas aliran sungai Jeneberang dengan luas  $\pm 2.415 \text{ Km}^2$  yang dapat menyediakan air irigasi seluas  $\pm 24.600 \text{ Ha}$ , konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak  $35.000.000 \text{ m}^3$  dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan  $16,30 \text{ Mega Watt}$ .<sup>34</sup>

## 2. Iklim dan Cuaca

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu  $2.467 \text{ mm}$  dengan suhu  $27,125^\circ\text{C}$ . Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan Desember yang mencapai rata-rata  $676 \text{ mm}$ , sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.<sup>35</sup>

## 3. Jumlah penduduk

Kabupaten Gowa termasuk kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

---

<sup>34</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015.

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

Berdasarkan hasil Susenas 2014, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 709.386 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45 persen penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58 persen wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55 persen penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12 persen, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18 persen dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Berdasarkan jenis kelamin dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah terdapat 348.706 laki-laki dan 360.680 perempuan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

**Tabel. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki	Perempuan	Jumlah	
Bontonompo	19.650	21.480	41.138	91
Bontonompo Sel	14.141	15.312	29.453	92
Bajeng	33.037	33.838	66.875	98
Bajeng Barat	11.832	12.464	24.296	95
Pallangga	55.997	57.420	113.417	98
Barombong	18.726	19.207	37.933	97
Somba Opu	75.577	76.339	151.916	99
Bontomarannu	16.796	17.052	33.858	98
Pattalassang	11.699	11.715	23.414	100
Parangloe	8.709	9.125	17.834	95
Manuju	7.129	7.599	14.728	94
Tinggimoncong	11.572	11.794	23.366	98
Tombolo Pao	14.465	14.039	28.504	103
Parigi	6.071	6.811	12.882	89
Bungaya	7.815	8.636	16.778	94
Bontolempangan	6.016	6.682	12.689	90
Tompobulu	13.916	14.937	28.853	93
Biringbulu	15.558	16.445	32.003	95
Jumlah 2014	348.706	360.680	709.386	97
Total 2013	339.575	351.734	691.309	97
2012	329.673	340.792	670.485	97
2011	324.021	335.492	659.513	97
2010	320.793	332.148	352.941	97

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa Dalam Angka Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah total penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2014 sebanyak 709. 386 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, rasio perbandingan keduanya adalah 97 dari jumlah total laki-laki 348.704 jiwa sedangkan jumlah total perempuan 360.680 jiwa. Jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa sangat kontradiktif dengan keterlibatan

politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Data diatas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lanskap politik di Kabupaten Gowa tidak seimbang antara jumlah dan keterlibatannya dalam berpolitik.

#### 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil angka sementara Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015, tercatat bahwa dari penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dari Kabupaten Gowa sekitar 16,86 persen tidak pernah sekolah, 18,82 persen yang masih sekolah dan 64,32 persen sudah tidak bersekolah lagi. Jumlah pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi adalah taman Kanak-Kanak sebanyak 254, Sekolah Dasar (SD) 408, Sekolah Luar Biasa (SLB) 5, Madrasah Ibtidaiyah 77, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 100, Madrasah Tsanawiyah (MTS) 54, Sekolah Menengah Umum (SMU) 40, Madrasah Aliyah (MA) 33, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 15, dan Universitas 5.<sup>37</sup>

Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan saat ini memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sehingga pembangunan dibidang pendidikan ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

**Tabel. 3 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/MI/Sederajat	58.184	70.070	128.254
2	SMP/MTS/Sederajat	42.234	37.825	80.059
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	47.856	47.688	95.544
4	D3	1.483	3.118	4.601
5	S1/S2/S3	11.432	11.304	22.736
	Jumlah 2014	161.189	170.005	331.194
	Total			

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah total penduduk laki-laki Kabupaten Gowa sebanyak 348.706 jiwa hanya 161.189 yang berpendidikan sedangkan dari jumlah total penduduk perempuan sebanyak 360.680 jiwa hanya 170.005 yang berpendidikan, jika dirata-ratakan sebanyak 50 persen yang tidak berpendidikan. Tingkat pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku politik sebuah masyarakat<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015



**Tabel. 4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan**

STATUS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI <i>Male</i>	PEREMPUAN <i>Female</i>	TOTAL <i>Total</i>
TIDAK PERNAH SEKOLAH	24.232	37.667	61.898
SD/MI	23.266	20.304	43.570
SLTP/MTS/Sederajat	15.455	16.576	32.031
SLTA/MA/Sederajat	16.946	15.440	32.031
DIPLOMA I KE ATAS	9.384	10.546	19.929
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	186.733	190.751	377.484
Jumlah/ <i>Total</i> 2014	276.014	291.283	567.289
2013	265.205	281.461	546.666
2012	253.198	236.252	471.450
2011	241.466	251.797	493.263
2010	254.799	268.177	522.976

Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa Dalam Angka 2014<sup>39</sup>

##### 5. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Pembangunan Daerah yaitu “Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggara pemerintahan”.

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan misi Kabupaten Gowa, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat.
2. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat.
4. Meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju dibidang pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Relevansi Budaya Lokal *Siri'* Terhadap Terwujudnya Politik Lokal (Pilkada) Yang Demokratis Di Kabupaten Gowa**

Pemilihan kepala daerah secara langsung memperoleh legitimasi sebagai dasar hukum dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat yang mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan secara langsung diyakini sebagai mekanisme yang lebih demokratis dibandingkan pemilihan secara perwakilan oleh DPRD. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah daerah, pemilihan kepala daerah justru menjadi ajang pertarungan kepentingan dan pertarungan kapital antara DPRD, partai politik, dan para kandidat kepala daerah. Hal inilah yang semakin menguatkan tuntutan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Revisi UU No. 22 Tahun 1999 yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi landasan normatif bagi penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satu perubahan yang cukup signifikan ditegaskan dalam pasal 24 ayat (5) UU 32 Tahun 2004, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan, selanjutnya dalam pasal 22 ayat 3 ditegaskan bahwa Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun

2004 sampai juni 2005 harus mengangkat pejabat kepala daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung serentak dilaksanakan bulan Juni 2005. Sedangkan, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, diselenggarakan pada bulan Desember 2008 untuk menghindari benturan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2009.<sup>41</sup>

Jika berpatokan pada pilkada di Kabupaten Gowa yang diselenggarakan berdasarkan prosedur UU No. 32 Tahun 2004 yaitu secara langsung maka layak dikatakan menuju politik lokal yang benar-benar demokratis sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Arif Budiman S.Sos selaku Komisioner KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia:

*“Proses demokrasi memang begitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari rakyat itu, bagaimana caranya menentukan pemimpin sesuai pilihannya, yah itu tadi melalui pilkada langsung. Bukan dari rakyat saya perintahkan perwakilanku untuk saya. proses yang seperti ini sebenarnya tidak murni demokrasi meskipun di Indonesia pernah seperti itu”<sup>42</sup>*

Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa Pilkada Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, jika berpatokan hanya pada sebatas proses bahwa rakyat akhirnya memiliki kebebasan secara langsung dapat memilih pemimpin sesuai kehendak sendiri maka praktek

---

<sup>41</sup> Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* (Bandung: Graha Ilmu, 2007), hal. 37-38.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Budiman S.sos, Komisioner KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 7 Oktober 2016.

demokratis secara murni memang demikian. Terlepas dari banyak hal yang kemudian melanggar atau mencederai prosedur-prosedur pilkada mulai dari pencalonan sampai pada penetapan hasil pilkada.

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Tip O'Neill menyatakan bahwa *all Politics is Local* yang dapat dimaknai bahwa demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan, instrument dan konfigurasi kearifan serta kesatuan politik lokal lebih dulu terbentuk. Hal ini berarti kebangkitan demokrasi politik di Indonesia secara ideal dan aktual diawali dengan pilkada langsung,

Pendapat yang diutarakan oleh O'Neill diatas sejalan dengan argumen yang dijelaskan oleh Robert Bates bahwa untuk memahami lebih dalam mengenai lanskap politik di Negara berkembang maka para ilmuan, analisis, pemerhati, dan pengamat harus lebih memperhatikan dan mencurahkan perhatiannya pada realita politik di level lokal. Pengertian yang lebih kongkret, Bates mengatakan bahwa arsitektur politik nasional dibentuk oleh lanskap politik lokal yang amat dipengaruhi oleh pilihan bebas para aktor

politik individual maupun kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu sistem dan struktur tersendiri dalam suatu masyarakat.<sup>43</sup>

Pilkada langsung adalah sebuah proses untuk menciptakan politik lokal yang lebih demokratis, meskipun pilkada langsung telah diselenggarakan hampir seluruh wilayah di Indonesia, tidak berarti menjadi indikator telah tercapainya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan politik yang demokratis. Masih banyak masalah yang diidentifikasi selama proses pemilihan kepala daerah. Permasalah-permasalahan tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan, namun juga terjadi pada tahap pelaksanaan pilkada. Cita-cita untuk menuju pemerintahn lokal yang demokratis ada banyak faktor yang sejatinya berperan penting didalamnya temaksud budaya lokal dan orientasinya terhadap demokratisasi.

Ada dua pandangan yang berbeda tentang perkembangan atau dinamika nilai-nilai demokrasi dalam budaya politik lokal masyarakat indonesia. Pertama, budaya politik demokratis tidak memiliki akar dalam budaya masyarakat Indonesia. Kedua, nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variannya telah tumbuh sejak lama di Indonesia seiring dengan dinamika budaya lokal masyarakat.<sup>44</sup> Sama halnya dengan relevansi konsep budaya *siri*'

---

<sup>43</sup> Leo Agustinus, *Pilkada dan dinamika politik lokal* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2009), hal. 17-18

<sup>44</sup> Siti Zuhro, Dkk. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 1-2.

terhadap terwujudnya politik lokal (pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa, penulis menemukan adanya dua pandangan yang berbeda, di satu sisi ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai *siri'* sangat Kompatibel dengan budaya *siri'* dan di sisi lain ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai *siri* tidak kompatible dengan demokrasi berikut uraiannya:

### **1. Budaya *Siri'* Kompatibel Dengan Demokrasi**

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variannya telah tumbuh sejak lama di Indonesia seiring dengan dinamika politik lokal masyarakat. Terkhusus pada nilai-nilai *siri'* dianggap sangat relevan dengan konsep demokrasi karena nilai-nilai demokrasi sudah tumbuh dalam sukma nilai-nilai *siri'* seperti yang disampaikan oleh Bapak Muh. Jufri Tenri Bali Daeng Pali selaku pengamat budaya serta sejarawan *Balla Lompoa* sebagai berikut:

*“Siri’ sangat relevan dengan kondisi sosial, termasuk politik namun saat ini secara umum seolah-olah nilai-nilai siri di masyarakat sudah mulai menghilang, itu karena adanya faktor modernitas berupa pembaharuan yang tidak terarah sehingga sepertinya kita belum menemukan jati diri berupa kepedulian dan kebersamaan”<sup>45</sup>*

Menurut yang disampaikan melalui wawancara di atas menegaskan bahwa sukma demokrasi tumbuh sejak lama dalam budaya lokal di Indonesia yakni pada budaya lokal *siri'*, yang menjadi hambatan belum terwujudnya

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Muh Jufri Tenri Bali Daeng Pali, Sejarawan dan Pengamat Budaya *Balla Lompoa* Gowa pada tanggal 13 oktober 2016.

politik lokal yang demokratis meskipun pada dasarnya dikatakan bahwa nilai-nilai demokrasi sejak lama tumbuh di Kabupaten Gowa dengan melekat pada sukma budaya *siri'* adalah karena pada dasarnya terjadi desakan zaman berupa modernitas yang tidak terarah dan terkontrol sehingga menjadikan sebagian orang tidak memahami konsep dan nilai-nilai *siri'* sebagaimana makna yang sesungguhnya.

Sebuah cara dalam usaha melihat konteks nilai-nilai demokrasi relevan dengan nilai-nilai lokal *siri'* maka menulis pertama-tama beranjak dari definisi demokrasi versi Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya *Capitalism, socialism, dan Democracy*. Dalam buku tersebut Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Pernyataan ini harus dimaknai dalam dua pengertian. Pengertian pertama demokrasi sebagai kehendak rakyat. Sudah dapat dipastikan bahwa demokrasi akan terwujud manakala kehendak rakyat yang mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah yang berkuasa dengan relatif baik, karena itu pengertian ini sebenarnya hendak mengatakan dari mana sumber demokrasi itu berasal atau lebih kongkretnya dari mana kekuasaan itu berada. Definisi ini sejalan dengan makna harfiah asal demokrasi yakni pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*).

Pengertian kedua dari demokrasi, dalam pemaknaan yang disampaikan oleh Schumpeter adalah sebagai kebaikan bersama (*common good*). Merujuk



pada ide awal pembentukan negara dikatakan bahwa kebaikan bersama kolektif warga masyarakat. Karena itu, menurut Schumpeter, tujuan sistem pemerintahan demokratis ialah menciptakan kebaikan bersama yang diterapkan melalui kontak politik. Jalan menuju hal tersebut tentu saja dengan kaedah demokratis, yang didalamnya terdapat mekanisme yang mampu menempatkan individu dalam memperoleh kekuasaan (untuk membuat keputusan kolektif) melalui perjuangan kompetisi demokratis dalam rangka merengkuh suara-suara pemilih.<sup>46</sup>

Defenisi tentang demokrasi yang dipaparkan oleh Schumpeter diatas sangat relevan dengan konsep *siri*' yang disampaikan oleh Bapak Muh. Jufri Tenri Bali Daeng Pali selaku Sejarawan dan Pengamat budaya *balla Lompoa* Gowa

*“Siri itu kalau berdasarkan asal kata bisa diartikan sebagai rasa malu, namun dalam pengertian yang luas siri’ berarti harga diri untuk memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya yang didalamnya terdapat nilai-nilai humanis terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat luas dengan tujuan kebaikan bersama, jadi siri itu lebih kepada nilai-nilai luhur,”*<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa nilai-nilai kebaikan secara kolektif dalam konsep demokrasi juga terdapat dalam nilai-nilai *siri*' yaitu nilai humanis untuk kebaikan bersama. Hal inilah yang dijadikan alasan

---

<sup>46</sup> Leo Agustinus, *Pilkada dan dinamika politik lokal* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2009), hal. 39-40.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Muh Jufri Tenri Bali Daeng Pali, Sejarawan dan Pengamat Budaya *Balla Lompoa* Gowa pada tanggal 13 oktober 2016.

bahwa konsep demokrasi secara nilai memiliki relevansi dengan konsep *siri*’ di Kabupaten Gowa.

Wujud pilkada demokratis di Indonesia secara jelas dipaparkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Berdasarkan isi dari UUD 1945 secara gamblang menjelaskan bahwa di dalam konsep demokrasi terdapat nilai-nilai bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Bapak Syaiful S.Hi Daeng Pasese selaku Wakil Sekretaris Umum DPC partai Demokrat Kabupaten Gowa sekaligus Tim pemenang nomor urut 1 pasangan Andi Maddusila Usman dan Wahyu Permana Kaharuddin di Pilkada Gowa Tahun 2015.

*“ketika seorang penyelenggara memiliki nilai budaya siri berupa malu jika tidak adil dan tidak jujur maka saya yakin dan percaya ini demokrasi akan sukses persoalan apapun yang dilakukan oleh kandidat dan constituen untuk mencederai demokrasi, itu bisa diatasi”<sup>48</sup>.*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa menurut narasumber prinsip-prinsip demokrasi terkait asas keadilan dan kejujuran dalam ranah pilkada lokal di Kabupaten Gowa bisa di topang dengan konsep nilai-nilai

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful S.HI Wakil Sekretaris Umum DPC partai Demokrat Kabupaten Gowa sekaligus tim sukses nomor urut 1 pasangan Andi Maddusila Usman dan Wahyu Permana Kaharuddin di Pilkada Gowa Tahun 2015 pada tanggal 14 oktober 2016.

*siri'*. Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Syaiful S.HI Daeng Pasese lebih menekankan bahwa nilai-nilai *siri'* berupa malu berbuat tidak adil dan tidak jujur harus dimiliki oleh para elit atau penyelenggara, hal ini senada dengan teori struktural fungsional Talcot Parsons bahwa perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Kemudian pengikutnya Faster menambahkan bahwa umumnya perubahan sosial ekonomi berawal dari perubahan yang berlangsung dikalangan atas seperti para elite politik, ekonomi dan kalangan intelektual, kemudian menyebar ke lapisan bawah di lingkungan masyarakat yang lebih tradisional untuk seterusnya mengimbas ke kalangan masyarakat pedesaan.

Rencana menuju pilkada yang demokratis di Kabupaten Gowa jika berpatokan dengan teori Talcot Parson dan Faster, maka penanaman nilai-nilai *siri'* berupa konsep kejujuran dan keadilan demi tercapainya kesejahteraan dan kebaikan secara kolektif, menjadi hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan kepada para elit politik seperti penyelenggara Pilkada, para kandidat dan komponen terkait lainnya. Para elit harus paham betul dan mengaktualisasikan konsep *siri'* karena dimulai dari paraelit maka kalangan bawah atau non elit secara sengaja ataupun tidak disengaja, dipaksa atau tidak, mereka akan turut mengaktualisasikan budaya *siri'* yang memiliki relevansi kuat terhadap terciptanya politik lokal yang demokratis.

## 2. Budaya *Siri'* Tidak Kompatibel Dengan Demokrasi

Penulis menemukan adanya pendapat lain yang mengatakan bahwa budaya *siri'* tidak relevan dengan konsep demokrasi, oleh karena itu untuk menguraikan hal tersebut penulis memaparkan terlebih dahulu makna yang terkandung dalam konsep demokrasi. Demokrasi adalah proses negosiasi. Demokrasi adalah instrument sosial yang mencerminkan sikap kerelaan untuk memberi dan menerima dalam suatu komunitas sosial, tempat dimana kepentingan perorangan diolah dalam konteks dan logika kebersamaan. Maka kemudian yang dikedepankan adalah dimensi bersama bukan individualistik. Egoisme menjadi pudar ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Hak-hak perorangan menjadi gamang saat komitmen kebersamaan mulai disemai. Oleh karena itu, sikap *akomodatif*, *partnership*, *sportifitas*, kearifan dan *kooperatif* harus menjadi sukma yang menyemangati prinsip kesetaraan yang berkeimbangan. Sebaliknya sikap arogansi, egoisme, dan tindakan main hakim sendiri merupakan kusta yang harus dihindari.

Jika berpatokan pada konsep diatas untuk melihat tingkat relevansi antara nilai-nilai *Siri'* dengan konsep demokrasi, maka penulis menemukan adanya pandangan yang mengatakan bahwa *siri'* tidak relevan dengan konsep demokrasi sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Lukman S.E selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPUD Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“Tindakan memprotes itu adalah bagian dari usaha kerja keras sampai batas terakhir yang bisa di lakukan, dan saya kira nilai-nilai siri begitu, berjuang sampai akhir artinya keteguhan dan kegigihan.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa konsep demokrasi tidak relevan atau sejalan dengan nilai-nilai *siri*. konsep demokrasi yang mengedepankan sikap *akomodatif, partnership, sportifitas* yang artinya setiap penyelenggaraan pilkada siapapun kandidatnya harus siap kalah dan siap menang, sementara di sisi lain konsep *siri* mengindikasikan adanya nilai-nilai yang mengharuskan setiap individu harus berjuang sampai batas terakhir yang bisa dilakukan bahkan sekalipun nyawa harus jadi taruhannya. Nilai-nilai yang berambisi dalam konsep *siri* bisa menjadi ancaman terhadap tuntutan sikap sportifitas dalam konsep demokrasi.

Pandangan lain yang juga mengindikasikan bahwa konsep *siri* tidak relevan dengan konsep demokrasi adalah yang disampaikan oleh Bapak Drs. Yusran Iring M.M selaku Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman S.E., Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS KPUD Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Oktober 2016.

*“kalu Konsep Siri’ kita bawah ke pilkada, kita bisa melihat bahwa yang kalah saja berusaha untuk menang apalagi yang memang sudah dikatakan menang, yang kalah saja berusaha mencari pembenaran apalagi yang menang jelas mi itu, padahal kedua-duanya ini bisa dikategorikan memiliki nilai-nilai siri yakni sikap mempertahankan yang dianggap benar.”<sup>50</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut mengindikasikan bahwa jika nilai-nilai *siri’* semata-mata dimaknai sebagai usaha mempertahankan kebenaran yang sifat subyektif maka *siri’* tidak relevan dengan konsep demokrasi. Secara tidak langsung pernyataan dari narasumber diatas menjelaskan bahwa konsep *siri’* dalam pemaknaanya tidak serta merta relevan dengan konsep demokrasi karena setiap orang memberikan pemahaman yang berbeda-beda tentang makna *siri’* tergantung dari situasi, kebutuhan, dan kondisi individu tersebut.

## **B. Aktualisasi Budaya *Siri’* di Pilkada Serentak Kabupaten Gowa Tahun**

### **2015**

Kebudayaan adalah sejumlah cita-cita, nilai dan standar perilaku. Kebudayaan adalah sebutan persamaan (*commony dominator*) yang menyebabkan perbuatan para individu dapat dipahami oleh kelompoknya, karena memiliki kebudayaan yang sama, orang yang satu dapat meramalkan perbuatan orang yang lain dalam situasi tertentu, dan mengambil tindakan yang sesuai. Menurut ahli antropologi berkebangsaan Inggris A.R. Radcliffe-Brown sekaligus pendiri aliran Struktural-Fungsioanal beserta pengikutnya mengatakan bahwa setiap kebiasaan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Yusran Iring M.M., Kepala Seksi pengembangan Budaya Daerah Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa pada Tanggal 11 oktober 2016.

dan kepercayaan dalam masyarakat mempunyai fungsi tertentu, yang berfungsi untuk melestarikan struktur masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat tersebut dapat tetap lestari<sup>51</sup>.

Berdasarkan pernyataan A.R. Radcliffe-Brown mengindikasikan budaya lokal di Kabupaten Gowa menjadi hal penting dalam membentuk struktur dan perilaku masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia politik. Kabupaten Gowa yang masyarakatnya mayoritas suku Makassar memiliki nilai-nilai budaya lokal yang dikenal dengan istilah *siri'*. Penulis menjabarkan konsep *siri'* untuk melihat aktualisasi *siri'* dalam konteks perpolitikan lokal, lebih terkhusus pada pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa sebagai berikut.

*Siri'* memiliki dua nilai sebagai makna esensial. Pertama, *Siri'* sebagai harga diri (*dignity*) dalam ukuran nilai aktual yang dipandang sepadan dengan harga diri, adalah kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan yang layak dari sesamanya itu merasa harga dirinya dilanggar. Kedua, *siri'* sebagai keteguhan hati dalam ukuran-ukuran kenyataan hidup, seseorang yang dipandang mempunyai keteguhan hati atau dalam kalimat bahasa Makassar disebut *tu tinggi siri'na* adalah seseorang yang mampu menentukan sikap sesuai dengan kebenaran dari ketetapan hati nuraninya yang benar, tidak mudah terombang ambing oleh desakan atau ancaman dari luar

---

<sup>51</sup> William A. Haviland, *Antropologi*, ( Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 332-333

dirinya. Termasuk dalam kelompok ini, mereka yang disebut kuat imannya, teguh kepribadiannya, dan sejenisnya.

Mempertahankan harga diri atau keteguhan hati dalam kehidupan masyarakat adalah termasuk perbuatan terpuji karena itu seseorang yang berbuat demikian harus membayarnya dengan nyawa, dalam kalimat bahasa Makassar disebut *tu mate nisantangi*. Dalam kenyataan empiris kehidupan sosial dewasa ini sikap menghargai bukan lagi semata-mata menjadi konsep monopoli orang Makassar tetapi sudah terbuka menjadi milik setiap orang yang cenderung mempertahankan kebenaran dan menyatakannya tanpa ragu-ragu<sup>52</sup>.

Teori strukturasi Anthoni giddens menyatakan bahwa hubungan pelaku (*agency*) dan struktur merupakan dualitas dan bukan dualisme yaitu adanya hubungan dualitas timbal balik agen dan struktur yang di dalamnya terdapat hubungan tindakan aktor dan struktur yang saling mengandaikan dan mempengaruhi. Penulis memposisikan nilai budaya *Siri'* sebagai struktur dan masyarakat Gowa secara umum sebagai aktor, oleh karena itu sejatinya aktualisasi nilai-nilai *siri'* berpengaruh terhadap tingkat Pilkada Gowa tahun 2015 yang lebih demokratis.

Penulis dalam melihat aktualisasi konsep budaya *siri'* di Kabupaten Gowa tahun 2015 menggunakan pemetaan dengan melihat dua hal yaitu sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Abu Hamid, Dkk. *Siri Dan Pesse' Harga Diri Manusia Bugis Makassar Mandar Toraja* ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2009) hal. 59-60.



## **1. Aktualisasi *Siri'* dalam Pilkada**

Secara substansi berdasarkan pada pembahasan sebelumnya penulis bisa menjustifikasi bahwa sukma demokrasi sangat relevan dengan nilai-nilai *siri'*, namun dengan terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran saat pilkada tahun 2015 Kabupaten Gowa sekaligus dijadikan indikator oleh penulis bahwa tidak teraktualisasikannya konsep dan nilai-nilai *siri'* sebagai penopang terhadap terciptanya politik lokal (pilkada) yang demokaratis di Kabupaten Gowa. Ada beberapa masalah yang terjadi di pilkada Gowa tahun 2015 yakni terdiri atas:

### **a. Tidak akuratnya penetapan data pemilih,**

Tidak akuratnya data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidakakuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes dan demonstran dari masyarakat, pada pilkada Gowa Tahun 2015 masalah yang demikian terjadi sebagai mana informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Syaiful S.HI Daeng Pasese selaku Wakil Sekretaris Umum Partai Demokrat Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“Analisis dari kajian kami bahwa dari 680 TPS di seluruh Kabupaten Gowa, itu yang dimainkan. itu berarti 68 persen. Mohon maaf, Andai saja hal seperti ini tidak terjadi maka partisipasi pemilih kemarin hanya 40 persen lebih, banyak surat undangan yang tidak sampai, dan syarat bagi yang tidak mendapat surat undangan maka boleh dengan KTP, lalu apa yang terjadi tetap saja dipersulit di TPS jika itu bukan pendukungnya Adnan.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membenarkan adanya proses memanipulasi data pemilih oleh penyelenggara pilkada untuk memenangkan pasangan nomor urut 5 yakni pasangan Adnan Purichita Ikhsan Yasin Limpo (APIYL). Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPUD maka sekaligus menjabarkan bahwa tidak diaktulisasikannya salah satu nilai-nilai *siri'* yaitu sifat adil, yakni hilangnya rasa malu karena tidak berlaku adil.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ketidakakuratan data pemilih pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes dan demonstran dari masyarakat. Pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPUD Kabupaten Gowa, kemudian menyatakan kemenangan pasangan nomor urut 5, massa pendukung pasangan nomor urut 1 yakni pasangan Andi Maddusila Usman dengan Wahyu Permana Kaharuddin mendatangi KPUD memprotes agar penetapan kemenangan nomor urut 5 tersebut dibatalkan dengan alasan terjadinya

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Syaiful S.HI Wakil Sekretaris Umum DPC partai Demokrat Kabupaten Gowa sekaligus tim sukses nomor urut 1 pasangan Andi Maddusila Usman dan Wahyu Permana Kaharuddin di Pilkada Gowa Tahun 2015 pada tanggal 14 oktober 2016.

pelanggaran terhadap data pemilih. Gelombang protes yang dilakukan massa pendukung sering kali menimbulkan minimal rasa ketakutan, melanggar hak-hak umum, dan bahkan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budiman S.Sos selaku Komisioner KPUD Kabupaten Gowa Divisi sosialisasi dan SDM sebagai berikut:

*“Yang melahirkan konflik bukan masyarakat tapi calon yang kompa-kompai (menghasut) masyarakat untuk datang demo KPU, kompa-kompai masyarakat dengan memberi uang 100 ribu untuk datang membakar KPU, semua itu bukan murni kehendak masyarakat, tapi masyarakat yang diperalat oleh calon karena ketidakpuasannya, karena tidak terpilih<sup>54</sup>”.*

Terjadinya tindakan memprotes hasil pilkada tersebut dibenarkan oleh pihak KPUD lainnya melalui wawancara bersama Ibu Asmawati S.H selaku Bagian Hukum KPUD Kabupaten Gowa:

*“Kemarin itu Massa bertahan sampai jam 10 malam, sampai-sampai kantor KPUD dijaga sama polisi, saya saja terpaksa pulang lewat belakang diantar sama polisi. Jadi massanya tetap bertahan di depan sampai jam 10 malam, sementara kami jam 8 malam sudah pulang lewat belakang. Kalau saya pribadi dari kaca mata hukum jelas ini melanggar, apalagi jika ada yang dirusak tapi ini bukan domain kami, kan ada pihak kepolisian yang tangani itu.<sup>55</sup>”*

Berdasarkan wawancara di atas hal yang menarik untuk dilihat adalah bahwa proses demonstrasi dengan menebar ketakutan terhadap orang lain jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *siri*'. Tindakan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Budiman S.Sos, Komisioner KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 7 Oktober 2016.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Asmawati S.H bagian Hukum KPUD kabupaten Gowa Pada Tanggal 10 oktober 2016.

memprotes KPUD dinilai bertentangan dengan nilai-nilai *siri* karena tidak mau menerima kekalahan, sekaligus menggunakan cara yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Bapak Muh. Jufri Tenri Bali Daeng Pali selaku pengamat budaya serta sejarawan *Balla Lompoa* memandang adanya pemaknaan yang berbeda-beda tentang konsep *siri* sebagai berikut.

*“Telah terjadi degradasi mengenai pemahaman nilai-nilai siri oleh masyarakat secara umum tetapi yang jelas siri itu berbicara tentang kebaikan bersama dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Jadi bukan mempertahankan siri jika merusak milik umum.”*<sup>56</sup>

Menurut apa yang disampaikan melalui wawancara di atas menegaskan bahwa selain aktualisasi *siri* yang belum diterapkan di pilkada tahun 2015, memang pada dasarnya bagi sebagian orang konsep *siri* tidak dipahami sesuai makna yang sesungguhnya.

b. KPUD yang tidak netral.

Ketidaknetralan KPUD dalam penyelenggaraan pilkada disebabkan oleh faktor jangkauan wilayah pilkada hanya se-propinsi atau kabupaten/kota. Faktor kedekatan dan kekerabatan antara penyelenggara pilkada dengan pasangan calon mempengaruhi tingkat kenetralan penyelenggara. Selain dari pada itu yang sangat dominan kekuasaan yang begitu kuat tanpa dapat dikoreksi oleh instansi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muh Jufri Tenri Bali Daeng Pali, Sejarawan dan Pengamat Budaya Ballak Lompoa Gowa pada tanggal 13 oktober 2016

manapun maupun pengadilan. Ketidaknetralan oleh KPUD sebagai penyelenggara pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, dikatakan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syaiful S.HI Daeng Pasese selaku Wakil Sekretaris Umum Partai Demokrat Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“Kaca mata politik saya, terkhusus di Kabupaten Gowa sudah menjadi budaya dan rahasia publik sebenarnya ketika anda mau menang berkoalisi dengan KPU, sehingga apapun yang kami lakukan ujung-ujungnya mentok ji pada saat gugatan, sudah 3 kali kami bersengketa mulai dari tahun 2005. Jadi dari kacamata saya, yang menang di pilkada 2015 ibarat kata berkoalisi dengan KPU. Bayangkan saja siapa yang bisa mengacak data pemilih, kan KPU. Demokrasi sudah terlaksana tetapi cita-citanya jauh, secara prosedur ia tapi cita-cita belum.”<sup>57</sup>*

Apa yang disampaikan melalui wawancara tersebut menggambarkan keberpihakan KPUD Kabupaten Gowa terhadap salah satu calon dalam pilkada Gowa tahun 2015. Ketidaknetralan oleh pihak KPUD sebagai penyelenggara Pilkada jelas merupakan perilaku melanggar nilai-nilai *siri*’ sekaligus nilai-nilai demokrasi pada asas kejujuran dan keadilan.

### c. *money politics*

Pelanggaran yang paling menonjol adalah pasangan calon memberikan sejumlah uang kepada parpol untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini menimbulkan persoalan apabila bakal calon tersebut tidak terpilih oleh parpol dan menuntut pengembalian uangnya namun

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful S.HI Wakil Sekretaris Umum DPC partai Demokrat Kabupaten Gowa sekaligus tim sukses nomor urut 1 pasangan Andi Maddusila Usman dan Wahyu Permana Kaharuddin di Pilkada Gowa Tahun 2015 pada tanggal 14 oktober 2016.

sulit dibuktikan karena tidak adanya tanda bukti penerimaan. Pelaksanaan pilkada mengindikasikan terjadi politik uang (*money Politics*) dalam pengerahan massa maupun memberi sejumlah barang atau sembako yang dapat dinilai dengan uang kepada masyarakat. Terjadinya praktek *money politics* dibenarkan oleh pihak KPUD Kabupaten Gowa melalui wawancara bersama Bapak Arif Budiman S.Sos selaku Komisioner KPUD Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan SDM sebagai berikut:

*“Biasanya praktek bagi-bagi uang ataupun sembako berlangsung saat masa-masa tenang kampanye yaitu sekitar satu minggu sebelum hari H pencoblosan.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas penyelenggara pilkada membenarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat calon Bupati Gowa berupa bagi-bagi uang beserta barang-barang lain. penulis melihat ada dua hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai *siri*'. Pertama, dari kandidat yang berbuat tidak jujur, dan yang kedua para konstituen yang rela menggadaikan hak suaranya demi imbalan uang dan lain-lain sebagainya.

d. mencuri star kampanye,

banyak pasangan calon yang belum memasuki tahapan pelaksanaan pilkada pada masa kampanye telah memasang iklan di media cetak dan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Budiman S.sos, Komisioner KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 7 Oktober 2016.

elektronik, spanduk, poster, baliho, dan stiker-stiker yang dibagikan kepada masyarakat, namun tidak mendapat tindakan tegas dari KPUD.

e. Dukungan PNS yang tidak netral

Penulis melihat dalam berbagai kampanye masih ditemukan PNS yang memihak salah satu pasangan calon dalam kampanye dan banyak terjadi memberi dukungan kepada daerah yang mengikuti kembali pilkada (*incumbent*) di lain sisi memang ada upaya bagi *incumbent* untuk memanfaatkan para pejabat dan staf pemda untuk membantu menggalang massa dan mencari dana untuk kepentingan kampanye apabila tidak dipenuhi akan diancam dengan mutasi atau pencopotan jabatan, seperti yang terjadi pada Pilkada Gowa tahun 2015 terjadi praktek PNS yang tidak netral dalam berbagi sektor seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaiful S.HI Daeng Pasese selaku Wakil Sekretaris Umum Partai Demokrat Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“Saya menjastifikasi bahwa semua kepala dusun adalah timnya Adnan, saya ada bukti dan faktanya. Semua kepala desa, semua camat, semua kepala dinas, next ASN ( Aparatur Sipil Negara ) sampai panwaspun seperti itu.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas penulis melihat bahwa keberpihakan PNS dalam mendukung kandidat yang statusnya sebagai *incumbent* adalah bukan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful S.H.I Wakil Sekretaris Umum DPC partai Demokrat Kabupaten Gowa sekaligus tim sukses nomor urut 1 pasangan Andi Maddusila Usman dan Wahyu Permana Kaharuddin di Pilkada Gowa Tahun 2015 pada tanggal 14 oktober 2016.

semata-mata murni kemauan PNS tersebut, tetapi karena adanya semacam tekanan yang diterimanya dari calon yang masih memiliki power secara birokrasi, misalnya ancaman mutasi sehingga mau atau tidak terjadilah praktek politik birokrasi di penyelenggaraan pilkada. Tidak menutup kemungkinan ada juga keberpihakan PNS murni sebagai kehendak sendiri karena ada jabatan strategis yang diinginkan jika kandidat yang didukung terpilih.

f. pelanggaran kampanye dalam pengerahan massa

pelanggaran kampanye yang paling menonjol adalah pelanggaran lalu lintas, terutama pengguna sepeda motor yang digunakan tiga orang dan tanpa helm, penggunaan kendaraan instansi pemerintah, pengerahan massa anak-anak, dan melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap lawannya. Hal ini sering didahului dengan laporan kepada pihak kepolisian bahwa pasangan calon tertentu telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak layak untuk dicalonkan.

## **2. Bupati Sebagai Produk Pilkada**

Penulis tidak hanya melihat aktualisasi *siri* pada saat berlangsungnya pilkada tetapi penulis juga melihat aktualisasi nilai-nilai *siri* dari pemimpin yang dihasilkan sebagai produk pilkada, oleh karena itu untuk mengawalinya penulis berpatokan pada UU No.32 tahun 2004. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, yang menjadi perbedaan UU No. 32 Tahun 2004 lebih memperjelas dan memepertegas hal-hal yang



sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dengan tujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999, terutama mengenai hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, antara Provinsi dengan Kabupaten/kota serta antara sesama daerah Kabupaten /Kota. Hubungan ini berkaitan dengan masalah kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.<sup>60</sup>

Secara umum UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi wewenang yang luas mengelola kekayaan daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, namun di sisi lain UU No. 22 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki.<sup>61</sup>

Pilkada Kabupaten Gowa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 menjadikan pasangan nomor urut 5 yakni pasangan Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo dengan Abdul Rauf Mallagani karaeng Kio' sebagai Bupati Gowa terpilih periode 2016-2021. Mendekati satu tahun pasca pelantikan sebagai pasangan Bupati Gowa terpilih, penulis melihat adanya upaya oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa untuk menjadi raja-raja kecil di daerah.

---

<sup>60</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 4.

<sup>61</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, hal.2-3.

Upaya Bupati Gowa untuk menjadi raja atau penguasa mutlak di kabupaten Gowa adalah dengan disahkannya perda LAD (lembaga Adat Daerah). LAD yang disahkan menjadi perda pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 merupakan bentuk nyata dari upaya Bupati Gowa menjadi raja dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam hal ini membuat Undang-undang atau peraturan daerah (Perda), seperti yang penulis peroleh melalui wawancara bersama bapak Muh. Taslim S.H M.H selaku kepala bagian hukum dan perundang-undangan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

*“jadi kami dibagian hukum ini posisinya sebagai penghubung atau jembatan antara pemerintah Kabupaten Gowa dengan DPRD terkait mengenai pembuatan perda. Kadang kala raperda sebelum jadi perda di usulkan oleh DPRD begitupun sebaliknya kadang dari PEMDA atau Bupati, kemudian kami fasilitasi untuk dirapatkan apakah pantas atau tidak, disahkan menjadi Perda. Terkhusus perda LAD ini memang murni usulan dari Bupati Gowa.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memaknainya bahwa perda LAD memang murni usulan Bupati Gowa sebagai upaya selain berkuasa secara birokrasi pemerintahan, juga upaya menguasai kondisi sosial budaya di Kabupaten Gowa. Lawan politik terkuat pasangan bupati Gowa terpilih saat pilkada tahun 2015 adalah nomor urut 1 yakni Andi Maddusila Usman berpasangan dengan wahyu Permana Kaharduddin. Andi Maddusila Usman yang notabene adalah keturunan raja Gowa sekaligus diangkat sebagai raja Gowa yang ke 37 seperti yang disampaikan oleh

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Muh. Taslim S.H M.H selaku kepala bagian Hukum Kabupaten Gowa pada tanggal 4 November 2016.

Bapak Andi Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa selaku kakak ipar Andi Maddusila Usman, suami dari kakak kandungnya yakni Andi Mirna sebagai berikut:

*“Andi Maddusila Usman memang sudah diangkat menjadi raja Gowa yang ke 37 dan diakui oleh semua keluarga kerajaan oleh karena itu semua urusan kerajaan kami serahkan kepada beliau, lagian saya juga sudah tua, bicara saja agak susah.”<sup>63</sup>*

Status raja Gowa yang dimiliki oleh Andi Maddusila Usman dianggap sebagai ancaman oleh Bupati Gowa terpilih. Lahirnya perda LAD secara tidak langsung menghilangkan status Andi Maddusila Usman sebagai Raja Gowa sesuai dengan isi LAD Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 yang berbunyi **”Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombaya<sup>64</sup>”** berdasarkan isi tersebut secara otomatis Andi Maddusila Usman tidak lagi memiliki kekuasaan atau power di kerajaan Gowa.

Konflik sebagai dampak dari lahirnya perda LAD adalah pecahnya bentrok antara satpol PP Gowa, selaku perpanjangan tangan Bupati Gowa Adnan Purichta IYL yang baru-baru saja dilantik menjadi ketua lembaga adat daerah Gowa yang menjalankan fungsi-fungsi sombaya dengan massa dari Andi Maddusila raja Gowa terbaru. Konflik semakin memuncak dengan dibobolnya brangkas benda pusaka

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa selaku kakak ipar Andi Maddusila Usman, suami dari kakak kandungnya yakni Andi Mirna pada Tanggal 4 November 2016

<sup>64</sup> Lembaran daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomo 05 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat daerah Kabupaten Gowa tahun 2016

Gowa di *Balla Lompoa* oleh tim yang dipimpin oleh wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Mallagani, karena kunci brangkas dipegang oleh Maddusila.<sup>65</sup>

Melihat kondisi ini penulis memaknai bahwa di Kabupaten Gowa unsur-unsur Budaya dijadikan sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak demi menjadi raja-raja kecil di daerah. Selain itu terkhusus mengenai aktualisasi *siri'* penulis memandang bahwa konflik yang terjadi dengan lahirnya perda LAD mengindikasikan bahwa budaya musyawarah duduk bersama, saling menghargai dan menghormati yang terhimpun dalam makna *siri'* tidak diaktualisasikan, justru sebaliknya yang ditunjukkan adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai *siri'* seperti sikap arogansi, egoisme, dan tindakan main hakim sendiri.

Perilaku yang melanggar nilai-nilai *siri'* semakin dipertegas lagi berdasarkan wawancara bersama Bapak Andi Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa selaku kakak ipar Andi Maddusila Usman suami dari kakak kandungnya yakni Andi Mirna sebagai berikut:

*“saya mengetahui LAD sesuai yang di sampaikan oleh media karena tidak ada sama sekali pemberitahuan dari pihak pemerintah Kabupaten Gowa, yang jelas saya pahami bahwa isi Perda LAD mengatakan Bupati menjalankan fungsi-fungsi Sombaya namun yang saya tidak pahami fungsi-fungsi sombaya yang seperti apa. Kalu dulu sombaya itu bisa di katakan king of the king (raja di atas raja).”*<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tribun Gowa.com

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa selaku kakak ipar Andi Maddusila Usman, suami dari kakak kandungnya yakni Andi Mirna pada Tanggal 4 November 2016

Hasil wawancara diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa budaya *mapatabe*’ perwujudan dari sifat saling menghargai tidak diaktualisasikan lagi. Pihak kerajaan merupakan bagian terpenting dari Perda malah tidak diminta pendapatnya padahal pihak PEMDA berdalih bahwa tujuan dari disahkannya perda LAD untuk memelihara cagar budaya lokal di Kabupaten Gowa, Jika memang dengan niat seperti itu seharusnya pihak Pemda dan Pihak kerajaan saling bekerjasama tanpa ada satu pihak yang mendominasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul **Relevansi dan Aktualisasi konsep Budaya *Siri'*, Terhadap Terciptanya Politik Lokal Yang Demokratis ( Studi Kasus Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa )**.

yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Relevansi Budaya *siri'* terhadap terciptanya politik lokal (pilkada) yang demokratis di Kabupaten Gowa. Penulis menemukan ada dua pendapat yang berbeda terkait mengenai tingkat korelevansian antara budaya *siri'* dengan konsep demokrasi yaitu sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa budaya *siri'* kompatible dengan konsep demokrasi. Yang menjadi alasan dari pendapat ini sehingga mengatakan bahwa nilai-nilai *siri'* relevan dengan konsep demokrasi adalah karena secara substansi nilai-nilai demokrasi sudah tumbuh dalam sukma nilai-nilai *siri'*. nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan secara kolektif dalam konsep demokrasi juga terdapat dalam nilai-nilai *siri'* yaitu nilai humanis untuk kebaikan bersama. Alasan kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan isi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas memaparkan bahwa Wujud pilkada yang demokratis di Indonesia adalah pemilihan umum harus dilaksanakan

secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pendapat ini menjadikan landasan bahwa asas keadilan dan kejujuran dalam ranah pilkada lokal di Kabupaten Gowa bisa di topang dengan konsep nilai-nilai *siri'*. yaitu berupa rasa malu berbuat tidak adil dan tidak jujur harus dimiliki oleh para elit atau penyelenggara.

Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa budaya *siri'* tidak kompatible dengan konsep demokrasi. Konsep demokrasi yang mengedepankan sikap *akomodatif, partnership, sportifitas* yang artinya setiap penyelenggaraan pilkada siapapun kandidatnya harus siap kalah dan siap menang, sementara di sisi lain jika nilai-nilai *siri'* semata-mata dimaknai sebagai usaha mempertahankan kebenaran yang sifatnya subyektif maka konsep *siri'* dalam pemaknaanya tidak serta merta relevan dengan konsep demokrasi karena setiap orang memberikan pemahaman yang berbeda-beda tentang makna *siri'* tergantung dari situasi, kebutuhan, dan kondisi individu tersebut. Bahkan konsep *siri'* bisa dimaknai mempertahankan pendapat subyektifnya secara total sekalipun nyawa harus jadi taruhannya. Nilai-nilai yang berambisi dalam konsep *siri'* bisa menjadi ancaman terhadap tuntutan sikap sportifitas dalam konsep demokrasi.

2. Nilai-nilai budaya *siri'* tidak diaktualisasikan pada pilkada serentak Kabupaten Gowa tahun 2015. Penulis membagi dua hal dalam melihat aktualisasi nilai-nilai *siri'* yaitu tidak teraktualisasikannya nilai-nilai *siri'* saat berlangsungnya

pemilukada dengan indikator terjadi banyak pelanggaran saat pilkada tahun 2015 yaitu sebagai berikut.

. Tindakan-tindakan brutal berupa menebar ancaman dan ketakutan kepada KPUD Kabupaten Gowa, berniat membakar KPUD, merusak fasilitas umum, dan membuat kemacetan di jalan poros lintas Kabupaten-Kota (Makassar-Gowa-Takalar). KPUD Kabupaten Gowa yang tidak netral, *money politics*, mencuri star kampanye, dukungan PNS yang tidak netral, dan pelanggaran kampanye dalam pengarahannya massa kampanye.

Selanjutnya pemimpin yang dihasilkan sebagai produk pilkada adalah pemimpin yang menjadikan budaya lokal sebagai alat politik untuk menjadi raja-raja kecil di daerah demi berkuasa secara mutlak. Lahirnya Perda LAD adalah upaya nyata yang melahirkan konflik sekaligus mengindikasikan bahwa budaya musyawarah duduk bersama, saling menghargai dan menghormati yang terhimpun dalam makna *siri* tidak diaktualisasikan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang relevansi dan aktualisasi konsep budaya *Siri* terhadap terciptanya politik lokal yang demokratis (studi kasus pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa), maka penulis mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, para elit politik dan pengurus partai politik di Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Gowa terkhusus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten



Gowa dalam melihat potensi budaya nilai-nilai *siri'* terhadap kehidupan sosial masyarakat Gowa yang lebih beradab secara umum dan kehidupan berpolitik yang demokratis secara khusus. Selanjutnya hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas pendidikan untuk menjadikan nilai-nilai *siri'* sebagai salah satu bahan pembelajaran di sekolah sebagai upaya mempertahankan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai positif.

2. Pemerintah, elit politik dan pengurus partai politik diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai *siri'* sebagai penopang dalam upaya mewujudkan politik lokal yang demokratis, salah satu cara adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *siri'* pada setiap penyelenggaraan pilkada pada masa yang akan datang. Pengenalan dan pengamalan konsep *siri'* bisa menjadi prioritas bagi para pengurus partai politik dalam proses kaderisasi untuk mencetak kader-kader politik yang memiliki *siri'* atau harga diri berupa rasa malu apabila bertindak tidak jujur, tidak adil, dan melanggar hak-hak kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Agustinus, Leo. *Pilkada dan dinamika politik lokal* Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2009.
- Albone, Abdul Azis. Dkk. *Dinamika kehidupan Beragama Muslim pedesaan* Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, 2003.
- Asshegaf, Rifqi Zabadi. *Demokrasi Otonomi Daerah Dan Perilaku Politik Jawara ( studi tentang Peran Jawara dalam kemenangan H. Mulyadi Jayabaya Dan H. Amir Hamzah Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2008)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : sebuah skripsi, 2013.
- Budiyono, Kabul, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik* Bandung: Alfabeta, 2012.
- David Marah dan Gerry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik* Bandung: Nusamedia, 2010.
- Fahri Rezki Rahman, *Aktualisasi nilai Budaya local dalam kepemimpinan pemerintahan di kota palopo*. Universitas Hasanuddin Makassar: Sebuah Skripsi, 2013.
- Giddens, Anthoni. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadinata, Bob Sugeng Dan Schuck, Christoph. *Demokrasi di Indonesia Teori Dan Praktik* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hamid, Abu Dkk. *Siri Dan Pesse' Harga Diri Manusia Bugis Makassar Mandar Toraja* Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Haviland, William A. *Antropologi* Jakarta: Erlangga, 1982.
- Hikmat, Mahi M. *Komunikasi Politik Teori Dan Praktek Dalam Pilkada Langsung* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, Makassar: Alauddin University Press , 2012.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Yogyakarta: Djambatan, 1979.

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Lembaran daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomo 05 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat daerah Kabupaten Gowa tahun 2016
- Mariana, Dede. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Bandung: Graha Ilmu 2007.
- Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Maulana, HB. Amiruddin, *Demi Makassar*, Makassar: Global Publishing, 2001.
- Muhammad Yusuf, Andi. *Reproduksi Status Tradisional Dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo*” Universitas Hasanuddin Makassar: Sebuah Skripsi, 2012.
- Moein MG, Andi. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar Sirik Na Pacce Ujung Pandang*: Mapress 1988.
- Nasution, S. *Metode Riset*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998.
- Noor,Isran. *Politik Otonomi Daerah*, Jakarta: Profajar Jurnalism, 2013.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sofianto, Yuwanto Arif. *Kontribusi Budaya Politik Lokal Dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)*”.
- Wahyuni, *Perilaku Beragama, Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan*, Makassar: Alauddin University Press,2003.
- Wismulyani, Endar. *Jejak Islam di Nusantara*, Cet 1, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Yustian Driyartana, Edwin, *Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Sebuah Skripsi.

Zuhro, R. Siti Dkk, *Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak, 2009.

<http://www.muslimmedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-as-sunnah.html#ixzz4D08lzILV>

[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-164-468991295-tesiscontent.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-164-468991295-tesiscontent.pdf)

Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Cet. I; Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Ḥasan al-Qusayrīy al-Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī t.th.

**LAMPIRAN**

**DAFTAR WAWANCARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROFESI</b>	<b>WAKTU</b>
<b>1</b>	Arif Budiman S.sos	Komisioner KPUD Kab. Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia.	7 Oktober 2016
<b>2</b>	Muh. Jufri Tenri Bali Daeng Pali	Sejarawan dan Pengamat Budaya Lokal <i>Balla' Lompoa</i> Gowa	13 Oktober 2016
<b>3</b>	Syaiful S.Hi	Wakil Sekretaris Umum DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa	14 Oktober 2016
<b>4</b>	Lukman S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS KPUD Kabupaten Gowa	11 Oktober 2016
<b>5</b>	Yusran Iring M.M	Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa	11 Oktober 2016
<b>6</b>	Asmawati S.H	Bagian Hukum KPUD Kabupaten Gowa	10 Oktober 2016
<b>7</b>	Muh. Taslim S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gowa	4 November 2016
<b>8</b>	Andi Makmun Bau Tayang Karaeng Bontolangkasa	Pemangku Adat Sekaligus Keluarga Kerajaan Gowa	4 November 2016



**Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPUD  
Kabupaten Gowa**



**Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia.**





**Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah Dinas  
Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.**



**Wawancara dengan Pengamat Budaya Serta Sejarawan *Balla Lompoa*  
Kabupaten Gowa**





**Wawancara dengan Wakil Sekretaris Umum Partai Demokrat Kabupaten Gowa**



**Wawancara dengan Keluarga Kerajaan Gowa.**



**Wawancara dengan kepala bagian Hukum dan Perundang-Undangan  
Kabupaten Gowa.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS USHULUDDI, FILSAFAT DAN POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK**

Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Makassar tel. ( 04110864924,  
fax, 864923 kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.63. Samata, ( gowa)  
Tln.. ( 0411 ) 424835. Fax. 424836

**PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Dengan ini Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan ini menyatakan bahwa;

Nama : Ardiansyah

NIM : 30600112046

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

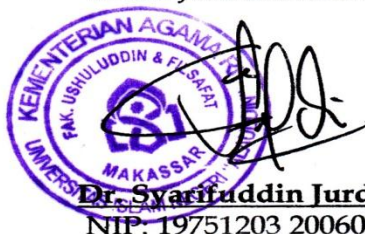
Judul Skripsi : **PENGAMALAN BUDAYA *SIRI*, *SIPAKATAU*, DAN *SIPAKALABBIRI*' SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PEMERINTAHAN LOKAL YANG DEMOKRATIS ( Studi Kasus Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa )".**

menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas adalah benar mahasiswa ilmu politik yang telah mempertahankan proposal penelitian skripsinya pada Ujian Seminar Proposal yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diergunakan sebagaimaa mestinya.

*Samata, 31 Agustus 2016*

Ketua Jurusan Ilmu Politik



**Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si**

NIP. 19751203 200604 1 001

## RIWAYAT HIDUP



**Ardiansyah**, lahir di Dusun Japing Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa pada tanggal 29 Agustus 1993. Anak pertama dari pasangan Ayahanda bernama Bohari daeng Manye' dan Ibunda bernama Saharia daeng Memang, dari tiga orang bersaudara.

Pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Inpres Japing Kab. Gowa (2006), MTS/SMP Pesantren Guppi Samata Kab. Gowa (2009 ), SMA Negeri 02 Sungguminasa Kab. Gowa (2012). Dan pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik kemudian selesai pada tahun 2016.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikannya atas rahmat Allah Swt dan dukungan serta doa dari kedua orang tua dengan memilih judul “Relevansi dan Aktualisasi Konsep Budaya *Siri*’ Terhadap Terciptanya Politik Lokal yang Demokratis pada PILKADA serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa”.